

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Gerakan Penolakan revisi UU KPK pada akhirnya tidak berhasil mengagalkan upaya revisi tersebut. Besarnya jumlah massa gerakan dan masifnya eskalasi gerakan ternyata tidak dapat mempengaruhi Presiden dan DPR RI untuk menghentikan revisi UU KPK. Pada bab ini dapat ditarik kesimpulan hasil dari pembahasan bab sebelumnya.

Dalam penelitian ini ditemukan pengaruh keterbukaan sistem politik pasca reformasi, seperti terjadi amandemen UUD 1945 hingga melahirkan pasal 28 yang menjamin kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat, artinya dalam penelitian ini masyarakat sipil juga seharusnya ambil bagian dalam pembuatan kebijakan publik. Atas dasar ini sehingga menjadi alasan gerakan anti korupsi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat tumbuh dan berkembang, karena semangat untuk terus menjadikan negara Indonesia semakin berintegritas. Jika dibandingkan dengan sebelum reformasi, gerakan anti korupsi tidak secara terang-terangan menjadi fokus utama. Kini *trend* gerakan anti korupsi telah menjadi arus utama.

Kedua, tidak berhasilnya gerakan dalam melakukan konsolidasi dengan elit penguasa untuk menarik dukungan. Faktor kedua ini peneliti melihatnya dengan kondisi antara pemerintah dan DPR RI sebagai pihak berwenang dalam pelaksanaan revisi UU KPK. Walaupun gerakan penolakan besar-besaran terjadi bukan hanya di Sumbar tetapi juga diseluruh Indonesia, nyatanya tidak mampu untuk mendesak dihentikannya pembahasan revisi UU KPK. Pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti menemukan terjadinya konsolidasi yang sangat kuat antar penguasa, dibuktikan dengan sepakatnya semua fraksi di DPR RI dan ditambah sikap

Presiden tidak menandatangani naskah hasil revisi. Walaupun tidak menandatangani, revisi tersebut tetap masuk ke dalam lembar negara karena telah mencapai waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan elit telah membangun kesepakatan bersama, sehingga tuntutan dari gerakan tidak menjadi halangan. Seharusnya gerakan untuk merubah kebijakan akan terbantu jika memiliki kolaborasi dengan elit penguasa, alasannya adalah elit penguasa akan menjadi pelaku utama yang akan memainkan peran dalam sistem politik dan memasukan tuntutan gerakan sebagai prioritas utama. Kenyataannya, salah satu hal yang dilakukan gerakan hanya mampu meminta DPRD Sumatera Barat menyurati DPR RI dan Presiden untuk menghentikan pembahasan UU kontroversial. Dengan demikian gerakan mengalami kekurangan untuk mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Untuk faktor internal gerakan, peneliti melihat Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) sebagai suatu kesatuan masyarakat sipil yang bergabung lantaran kesamaan tujuan dan telah terbina oleh lingkaran pertemanan. Mencermati suatu organisasi penting dalam gerakan seperti dalam teori mobilisasi sumberdaya menyebutkan bahwa baik formal maupun informal organisasi gerakan sosial penting untuk tempat orang melibatkan diri. Peneliti menyimpulkan KMSS sebagai aliansi gerakan memiliki kekurangan dalam pendidikan terhadap isu kepada peserta gerakan, ini juga disebabkan lantaran sifat organisasi yang tidak formal. Sehingga tidak ada agenda pengkaderan yang jelas.

Dalam gerakan KMSS ini ditemukan upaya dalam membingkai makna dan motivasi. Membingkai makna dalam temuan peneliti yaitu upaya revisi UU KPK adalah cara legal untuk membunuh KPK. Selain itu juga dilakukan kampanye kreatif dengan menggunakan simbol-simbol untuk mudah diingat publik seperti penggunaan boneka pocong dalam aksi atau menggunakan simbol tradisi budaya lokal seperti aksi

tolak bala. Sedangkan motivasi dalam gerakan KMSS menggunakan upaya pemahaman kepada publik mengenai poin- poin revisi UU KPK dan alasan mengapa harus ditolak serta motivasi untuk mengajak masyarakat ambil bagian dalam gerakan ini. Caranya berupa orasi-orasi ketika demonstrasi, diskusi dalam lingkaran kecil, penyebaran kajian. Tidak kalah penting penggunaan media sosial oleh para peserta gerakan, dalam kesimpulan peneliti peran dari media sosial terhadap gerakan sangat memberikan dampak yang patut diperhitungkan. Banyaknya pengguna media sosial menjadi alasan penting menjadikannya sarana dalam gerakan. Ini terbukti dengan banyaknya partisipasi massa gerakan yang dalam beberapa sumber terbukti yang terbesar setelah gerakan reformasi 1998.

## **6.2 Saran**

### **1. Secara Akademis**

Dalam penelitian ini terdapat temuan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam kemajuan gerakan sosial, namun peneliti tidak terlalu mendalam membahasnya. Untuk itu bagi penelitian selanjutnya agar memfokuskan kajiannya kepada pemanfaatan media sosial yang digunakan dalam gerakan.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini secara khusus diharapkan mampu menambah bacaan dalam melihat dinamika gerakan anti korupsi di Sumatera Barat, serta dapat berguna menjadi bahan kajian untuk menjalankan gerakan sosial.